

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan merupakan syarat penting bagi suatu negara agar dapat disebut sebagai negara berdaulat. Tanpa adanya rasa aman, akan sulit bagi suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, semua negara berusaha untuk menciptakan keamanan bagi negaranya. Terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, muncul kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang di masa yang akan datang. Tidak terkecuali bagi Korea Selatan, pasca gencatan senjata yang menandai terpisahnya dua Korea di tahun 1953, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara belum membaik. Kedua negara ini masih saling bersitegang. Bagi Korea Selatan, Korea Utara menjadi ancaman keamanan yang besar dengan senjata nuklirnya. Ancaman ini tidak hanya berlaku pada Korea Selatan, tetapi juga pada Jepang sebagai dua negara aliansi utama Amerika Serikat (AS).

Menanggapi ancaman senjata nuklir yang terus dilakukan oleh Korea Utara, AS merespon dengan mengajukan sebuah usulan untuk membentuk kerjasama militer, yang lebih formal dan dilembagakan, dengan Korea Selatan dan Jepang yang disebut *Trilateral Military Alliance*. Hal ini selain bertujuan sebagai upaya *deterrence* terhadap Pyongyang, juga dilakukan untuk menciptakan keamanan di wilayah Asia Timur. Aliansi yang dimaksudkan adalah bentuk aliansi 3 negara yang terpusat dan dilembagakan.

Dalam hubungan internasional, hubungan trilateral melibatkan tiga entitas yang memiliki tujuan politik yang sama dan visi strategis terhadap tatanan regional maupun internasional. Kerjasama trilateral atau juga disebut trilateralisme seringkali digambarkan lebih besar dari kerjasama bilateral namun merupakan bentuk sederhana dari

multilateralisme. (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 3). Trilateralisme kemungkinan akan membawa manfaat besar bagi masing-masing negara anggota di bidang keamanan. Kerjasama tiga-arah dalam menangani ancaman keamanan regional, dengan Korea Utara sebagai prioritas utama, dapat berkontribusi pada kesiapsiagaan dan keefektifan ketiga negara dengan mengerahkan sumber daya dan intelijen mereka untuk mencapai tujuan keamanan bersama. Ketika Korea Utara tanpa henti meningkatkan ambisi militernya melalui pengembangan teknologi *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* dengan kemampuan yang berkembang untuk mencapai daratan Amerika Serikat, kebutuhan untuk bekerja sama di depan keamanan semakin mendesak (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 15).

Beberapa ilmuwan kemudian menekankan nilai intrinsik dari hubungan trilateral sebagai bentuk sah kerja sama regional yang memberi manfaat kepada semua pihak yang berpartisipasi. Menurut pandangan ini, trilateralisme adalah bentuk multilateral yang paling diminimalisir dan karenanya mewarisi beberapa keuntungan dasar multilateralisme tradisional sambil menghindari masalah-masalah yang paling serius. Muhui Zhang berpendapat bahwa karena jumlah mitra kerjasama yang relatif kecil, trilateralisme dikenal luas karena efisiensinya, mengingat bahwa komplikasi dan biaya transaksi diharapkan sebanding dengan jumlah aktor yang terlibat dalam pengaturan multilateral (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 5). Aliansi dapat menghemat biaya dan menggandakan manfaat melalui pembagian tanggung jawab, pembagian aset umum, atau hanya perlindungan yang diberikan dengan memiliki negara yang lebih kuat sebagai sekutu (Tetra, 2004, hal. 136). *Trilateral Military Alliance* yang ingin dijalin oleh AS ini memberikan keuntungan kepada Korea Selatan terkait teknologi militer. Jepang dan AS dikenal memiliki atribut dan peralatan militer dengan teknologi yang sangat canggih. Hal ini berarti, trilateralisme dalam bidang militer ini memungkinkan Seoul untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana bertukar informasi dan teknologi. Aliansi militer ini juga

termasuk pertukaran intelijen. Korea Selatan bisa memanfaatkan pertukaran intelijen ini untuk mengawasi Pyongyang, terutama mengenai uji coba nuklir yang semakin giat dilakukan beberapa tahun terakhir ini.

Trilateralisme juga menawarkan banyak manfaat yang sama dengan kerja sama multilateral tradisional. Pertama, memastikan aliran komunikasi yang stabil dan efektif dengan melembagakan titik kontak untuk pelaku kerjasama. Sejauh ini kerjasama militer masih dilakukan secara bilateral antara Korea Selatan-AS dan Korea Selatan-Jepang. Kerjasama trilateral ini membuat komunikasi ketiga negara lebih efektif terutama dengan kepentingan yang sama yaitu menghadapi Korea Utara. Sehingga Seoul tidak perlu “bolak-balik” untuk berdiskusi mengenai hal ini. Kedua, kerjasama trilateral juga memfasilitasi perencanaan kebijakan jangka panjang dan memupuk pembangunan institusi di antara negara-negara yang terlibat. Dalam proses ini, para pihak dapat memetik manfaat dari norma-norma bersama dan koordinasi yang lebih erat di bidang isu yang luas (Kamphausen, Park, Sahashi, & Szwalwinski, 2018, hal. 5).

Upaya pembentukan kerjasama antar 3 negara, yakni Korea Selatan, AS dan Jepang ini telah dilakukan sejak berakhirnya Perang Dingin. AS yang saat itu ingin mencegah penyebaran paham komunisme di Asia menjadikan Korea Selatan dan Jepang sebagai aliansi. Kerjasama antar ketiganya meningkat di tahun 1990an diawali dengan *Defense Trilateral Talks (DTT)* pada tahun 1994. Pertemuan ini diadakan di tingkat wakil menteri dan berlangsung hingga tahun 2002. Selain itu, pertemuan tingkat wakil menteri lainnya yakni *Trilateral Coordination and Oversight Group (TCOG)* juga dibentuk pada tahun 1999 untuk mengatasi ancaman yang meningkat dari pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara. TCOG terus melakukan pertemuan hingga tahun 2004 dan akhirnya diubah menjadi *Six Party Talks* (Kim, 2017, hal. 3).

Korea Selatan dan Jepang telah menjadi *main allies* AS sejak berakhirnya Perang Dunia II. Hingga saat ini, AS memiliki pangkalan militer yang menampung ribuan tentaranya di dua negara tersebut. Kerjasama bilateral antara AS-Korea Selatan terutama dalam bidang militer berjalan dengan cukup baik. Sementara itu, hubungan Seoul dengan Tokyo tidak begitu harmonis, bahkan sempat tidak mengakui kemerdekaan satu sama lain. Hal ini terkait dengan sejarah kelam yang membayangi keduanya, terutama mengenai isu *comfort women*, dimana ribuan wanita di Korea Selatan dipaksa menjadi budak seks untuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Korea Selatan meminta permohonan maaf secara langsung dan kompensasi untuk para korban dari pemerintah Jepang. Namun, Jepang mengklaim bahwa ia telah menyatakan permohonan maafnya dan memberikan dana bantuan kepada korban di tahun 1965. Berkat upaya AS untuk meredakan tensi antara Seoul-Tokyo, kini kedua negara telah mampu mencapai *mutual understanding* dan kerjasama bilateral antar keduanya terus meningkat (Çolakoglu, 2016).

Kedekatan antar tiga negara ini kemudian mengalami penurunan di era Presiden Korea Selatan Roh Myung Moon. Hal ini dikarenakan tingginya sensitivitas terhadap isu *comfort women* dan masalah teritorial. Hubungan ketiganya sempat mencair di awal pemerintahan Lee Myung Bak, namun hubungan bilateral Korea Selatan-Jepang kembali memburuk hingga tahun 2015 ketika Park Geun Hye dan Shinzo Abe berhasil mencapai kesepakatan mengenai masalah tersulit bagi kedua negara yaitu *comfort women* (Kim, 2017, hal. 3).

Hubungan bilateral Seoul-Tokyo memang sangat fluktuatif. Pada awal 2016, hubungan trilateral antara AS, Korea Selatan dan Jepang tampaknya mencapai periode emas kerja sama karena kemajuan pada isu-isu sensitif seperti pertahanan rudal dan pembagian informasi. Selain itu, melihat ancaman nuklir Korea Utara yang terus meningkat, di tahun 2016 Korea Selatan dan Jepang menandatangani General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) setelah sebelumnya gagal

di tahun 2010. Setelah dilantik sebagai Presiden Korea Selatan yang baru pada Mei 2017, Moon Jae In yang nasionalis berhasil menyelesaikan pertemuan dengan Shinzo Abe di bulan Juli 2017. Keduanya setuju untuk melakukan kebijakan dua jalur yang memisahkan antara keamanan dengan sejarah. Jepang juga menyampaikan ajakannya kepada Korea Selatan untuk membentuk aliansi militer bersama Amerika Serikat. (Kim, 2017, hal. 4).

Meskipun hubungan Korea Selatan dengan AS dan Jepang kian membaik, Presiden Moon Jae In membuat pernyataan yang diluar dugaan. Ia dengan tegas menolak ajakan dari AS dan Jepang untuk membentuk *Trilateral Military Alliance*. (Yonhap News, 2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan rumusan masalah yang nantinya akan dibahas yaitu **“mengapa Korea Selatan menolak untuk bergabung dalam *trilateral military alliance*?”**

C. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah berfungsi sebagai kacamata untuk memfokuskan arah penelitian serta menganalisa berbagai fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan *decision making theory*.

Decision Making Theory

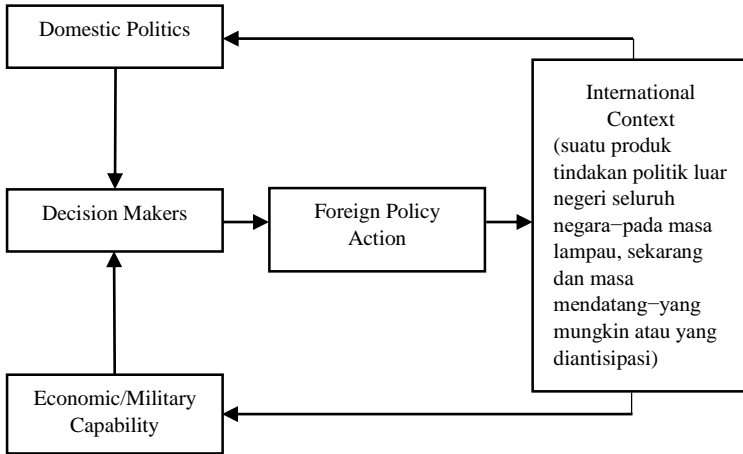
Decision Making Theory merupakan sebuah teori untuk menganalisa proses pembuatan kebijakan oleh suatu negara melalui berbagai aspek yang kemudian dijadikan konsiderasi. Dalam pembuatan sebuah keputusan luar negeri, tidak mengharuskan semua aspek itu untuk memberikan pengaruh. Terkadang keterlibatan satu atau dua aspek saja bisa

memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin ini menyatakan:

“Apabila kita mempertanyakan mengapa negara berperilaku seperti itu, maka kita harus mempertanyakan mengapa para pemimpin negara tersebut membuat keputusan seperti itu. Akan tetapi, salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan luar negeri (decision maker) bertindak sembarangan. Akan tetapi, sebaliknya, tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari 3 (tiga) konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama kondisi politik dalam negeri (domestic politics) mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer (economic/military capability); dan ketiga konteks internasional (international context), yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu. (Coplin, 1992, hal. 30)”

Berikut adalah ilustrasi yang digambarkan oleh Coplin,

Gambar 1.1 Ilustrasi Pembuatan Keputusan Luar Negeri



Sumber: William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis. Sinar Baru. Bandung. 1992

Coplin menggambarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara seperti yang telah dibahas sebelumnya. *Domestic politics* merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam negeri. Peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri akan mengasumsikan bahwa terdapat berbagai perbedaan substansial yang bersifat lintas nasional (Coplin, 1992, hal. 73). Meskipun kondisi politik setiap negara berbeda, Coplin menyatakan bahwa perlu dibuat sebuah konsep yang umum untuk menganalisis sebuah fenomena. Konsep yang terdapat dalam *domestic politics* ini berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negerinya. Aktor-aktor yang terlibat dalam konsep ini kemudian disebut sebagai *policy influencers* sementara hubungan antar aktor dengan proses

pembuatan kebijakan disebut *policy influence system* (Coplin, 1992, hal. 74).

Policy influence system merupakan sebuah sistem timbal balik antara pembuat keputusan dan *policy influencers*-nya. Di satu sisi, para pembuat keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan bagi rezim mereka. Sementara *policy influencers* juga membutuhkan para pembuat kebijakan agar mempermudah jalan bagi tuntutan mereka untuk dijadikan sebuah kebijakan. Jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi maka dukungan tersebut bisa saja hilang, baik sebagian maupun keseluruhan (Coplin, 1992, hal. 76). Coplin kemudian membagi *policy influencers* ke dalam 4 (empat) tipe:

1. *Bureaucratic influencers*, merujuk pada organisasi serta berbagai individu yang ada dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan luar negeri. Birokrat memiliki akses langsung kepada pembuat keputusan serta merupakan sumber informasi. Mereka menyalurkan informasi tersebut dan melaksanakan kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, peran birokrat menjadi sangat penting. *Bureaucratic influencers* biasanya tidak secara langsung menentang sebuah kebijakan, namun biasanya dilakukan secara rahasia maupun melalui lobi-lobi oleh individu (Coplin, 1992, hal. 82-83).
2. *Partisan influencers* atau partai politik, bertujuan untuk menterjemahkan tuntutan dari masyarakat menjadi tuntutan politik yang kemudian disampaikan kepada pembuat keputusan. Partai politik mempengaruhi pembuat keputusan dengan menekan para penguasa melalui anggota yang dapat berperan dalam proses tersebut (Coplin, 1992, hal. 84).
3. *Interest influencers*, merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama yang belum cukup untuk dijadikan partai tetapi sangat dibutuhkan untuk

menyerahkan sumber-sumber dan mendapatkan dukungan dari *policy influencers* maupun para pengambil keputusan. Mereka juga dapat mempengaruhi *partisan influencers* dan para pemilih. Hal ini dikarenakan kelompok ini memiliki dukungan finansial yang besar. *Interest influencers* menggunakan beberapa teknik untuk membentuk dukungan terhadap kepentingan mereka. Mereka bisa melakukan kampanye atau menulis surat kepada tidak hanya pembuat keputusan, tetapi juga *bureaucratic* dan *partisan influencers*. Selain itu, mereka bisa juga menjanjikan bantuan finansial maupun sebaliknya menarik bantuan finansial yang ada (Coplin, 1992, hal. 87-88).

4. *Mass influencers*, diwujudkan dalam bentuk opini publik. Di negara demokrasi penyampaian opini publik ini dilakukan tanpa adanya kontrol “dari atas”. Pembuat keputusan menggunakan *mass influencers* bukan karena peran mereka dalam pemilu, melainkan mereka memformulasikan kebijakan-kebijakan dengan memperhatikan efeknya terhadap opini publik dan pemilu berikutnya. Meskipun opini publik bisa dikatakan bukan profesional, tetapi informasi ini bersifat konstan terutama mengenai pandangan tentang pemerintah (Coplin, 1992, hal. 89).

Faktor berikutnya adalah *economic/military capability*. Faktor ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana dan sebesar apa kemampuan suatu negara untuk melaksanakan sebuah kebijakan luar negeri, serta kelemahan dan keterbatasannya yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer. Keseimbangan antara kapasitas ekonomi dan militer juga dibutuhkan karena negara tidak bisa hanya berfokus untuk meningkatkan perekonomian tanpa juga meningkatkan kapasitas militernya yang berkaitan dengan keamanan baik nasional maupun regional.

Berikutnya adalah faktor *international context* dimana faktor ini juga berperan penting dalam pengambilan keputusan

luar negeri. Terdapat tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri dari lokasi negara tersebut dalam kaitannya dengan negara-negara lain di lingkungannya (negara tetangga) juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara tersebut dengan negara-negara lain (Coplin, 1992, hal. 167).

Moon Jae In resmi diangkat sebagai Presiden Korea Selatan pada Mei 2017 lalu. Presiden Moon memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Apabila dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan Korea Selatan yang memilih untuk menolak bergabung dalam *trilateral military alliance* bersama AS dan Jepang. Kondisi politik domestik Seoul lebih berfokus pada upaya perbaikan hubungan dengan Pyongyang. Partai Demokrat, partai politik kubu Moon Jae In serta birokrat pemerintah Seoul dengan kukuh menyatakan bahwa ingin menjalankan kembali *Sunshine Policy* yang ditanggguhkan pada dua periode partai konservatif (Silberstein, 2017, hal. 2). *Sunshine Policy* merupakan kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk melonggarkan pertahanan di Korea Utara, merangkul Korea Utara, dan akhirnya membuat pemerintah Korea Utara melakukan denuklirisasi dengan sendirinya. Kebijakan ini terinspirasi dari upaya normalisasi yang dilakukan oleh Jerman Barat terhadap Jerman Timur. Keputusan ini juga didukung dengan kondisi masyarakat yang ingin berfokus pada kondisi domestik seperti pemerataan ekonomi, karena masyarakat merasakan semakin meningkatnya ketimpangan sosial serta angka pengangguran yang justru meningkat setiap tahunnya (BTI, 2018). Angka pengangguran usia 15-29 tahun mencapai presentase tertingginya di tahun 2017, yakni 22.7% dan 3.7% untuk semua usia (Xinhua, 2018). Masyarakat Korea Selatan sempat melakukan demonstrasi dengan memblokade jalan masuknya *US owned military vehicle (MOV)* yang akan masuk ke Seongju dan memasang baterai THAAD disana (Osborne, 2017). Masyarakat berharap tidak akan ada lagi kerjasama-

kerjasama militer lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya demonstrasi besar-besaran sempat dilakukan pada tahun 2016 ketika Park Geun Hye memutuskan untuk memasang THAAD.

Dalam faktor selanjutnya yaitu kondisi ekonomi dan militer. Dalam faktor ini, kondisi ekonomi Korea Selatan bisa dikatakan dalam kondisi yang baik. Meskipun sempat mengalami penurunan dalam neraca perdagangan di tahun 2016, dimana total ekspor turun sebesar \$32 miliar menjadi \$495 miliar dan impor dari \$436 menjadi \$406 miliar. Korea Selatan berhasil kembali meningkatkan angka tersebut per tahun 2017 (Korea Economic Outlook, 2018).

Korea Selatan juga meningkatkan *military spending* pada tahun 2017 sebesar 40 triliun won. Anggaran ini disebut-sebut akan difokuskan untuk meningkatkan kekuatan militer (Prameswaran, 2016).

Faktor terakhir yaitu konteks internasional, adanya tekanan yang diberikan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kepada Korea Selatan terutama ketika Seoul memutuskan untuk tetap melakukan instalasi THAAD. RRT memberikan sanksi *unofficial* kepada Korea Selatan sebagai bentuk penolakan RRT terhadap instalasi THAAD. Sanksi ini berupa ditutupnya akses masuk barang dan jasa dari negeri ginseng tersebut dan melarang masyarakatnya untuk bertamasya ke Korea Selatan. Selain pemerintah, masyarakat juga mengalami kerugian. Disebutkan bahwa lebih dari 60% turis yang datang ke Korea Selatan berasal dari RRT, dengan adanya sanksi ini masyarakat pun ikut menyayangkannya. RRT dianggap menjadi salah satu faktor yang menekan posisi Korea Selatan apabila “terlalu dekat” dengan AS dengan berbagai kerjasama yang dijalankan. Beijing merupakan pasar ekonomi besar bagi Seoul. Banyak juga yang menilai bahwa RRT dapat membantu Korea Selatan untuk membawa Korea Utara duduk di meja perundingan.

Ketika Korea Selatan mencoba untuk melakukan rekonsiliasi, RRT menawarkan sebuah perjanjian yang disebut *three nos*:

1. tidak ada tambahan instalasi THAAD di Korea Selatan (dalam hal ini tambahan yang dimaksud ialah baterai maupun *launcher*);
2. tidak ada partisipasi dalam sistem pertahanan rudal strategis bersama AS;
3. tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral Korea Selatan-AS-Jepang (Panda, 2017).

Perjanjian ini kemudian disetujui oleh Korea Selatan.

D. Hipotesa

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Korea Selatan menolak tawaran AS untuk bergabung dalam *trilateral military alliance* karena:

1. Politik domestik Korea Selatan yang dipengaruhi oleh *pasrtisan influencers* dan *mass influencers* ingin lebih berfokus pada kondisi domestik
2. Tekanan internasional yang diberikan oleh RRT pada Korea Selatan mengenai pembentukan *Trilateral Military Alliance*

E. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul “Alasan Korea Selatan Menolak Bergabung Dalam *Trilateral Military Alliance*” ini adalah:

1. Mengetahui alasan-alasan Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae In menolak tawaran AS untuk bergabung dalam *trilateral military alliance*
2. Mengimplementasikan teori yang telah dipelajari selama kuliah

F. Jangkauan Penelitian

Adapun jangkauan penelitian dalam penulisan skripsi ini dimulai sejak Moon Jae In diangkat sebagai Presiden Korea Selatan, menggantikan Park Geun Hye pada Mei 2017 hingga Oktober 2018 ketika Korea Selatan meratifikasi kesepakatan untuk rekonsiliasi dengan Korea Utara. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk disinggunginya pembahasan mengenai politik luar negeri Korea Selatan terhadap aktor-aktor utama di masa sebelum Moon Jae In untuk menggambarkan perubahan maupun peningkatan yang terjadi.

G. Metode Penulisan

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk memahami fenomena dalam memahami kehidupan sosial dan metode-metodenya secara umum menggunakan kata sebagai data untuk analisis. Metode ini juga memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan ‘apa’, ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ (Patton & Cohran, 2002, hal. 2-3). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah dengan menggunakan metode *Library Research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisis dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab membahas hal yang berbeda, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab II Politik Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Mitra-mitra Utama

Dalam bab ini akan dibahas mengenai politik luar negeri Korea Selatan dengan mitra-mitra utama yang terlibat yaitu Amerika Serikat, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok serta Korea Utara.

3. Bab III Signifikansi Trilateralisme dan Aliansi Militer

Bab ini akan membahas mengenai rancangan awal kerjasama trilateral yang kemudian mengerucut pada pembentukan *trilateral military alliance* serta signifikansi dan keuntungan yang akan didapatkan oleh Korea Selatan apabila bergabung dalam aliansi ini bersama Amerika Serikat dan Jepang.

4. Bab IV Sebab-sebab Penolakan Korea Selatan untuk Bergabung dalam *Trilateral Military Alliance*

Bab ini akan membahas mengenai analisa sebab-sebab penolakan Korea Selatan untuk bergabung dengan *trilateral military alliance* dengan melihat bagaimana peran faktor domestik dan internasional berperan dalam pengambilan keputusan luar negeri.

Bab V Kesimpulan